

ISSN : 1410-3648

Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

PERSPEKTIF

Terakreditasi "B"

PUBLISH OR PERISH

DAFTAR ISI

Editorial

Artikel :

- Pengaturan Pengelolaan Konservasi Kelautan Berkelanjutan
Oleh Febria Nur Kasimon
- Pengaturan Hak Normatif Bagi Pekerja/Buruh Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Oleh Joko Nur Sariono dan Suhandi
- Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Etika Profesi Kedokteran Dan Hak Asasi Manusia
Oleh Noor Tri Hastuti dan Ratna Winahyu Lestari Dewi
- Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Guna Menciptakan Peradilan Yang Bebas Dan Tidak Memihak
Oleh Ronny Winarno dan Endang Retnowati
- Kejahatan Korporasi Dalam Hukum Perbankan Indonesia
Oleh Theodosia Yovita
- Proses Dan Lembaga Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi
Oleh Umi Enggarsasi
- Eksistensi Pengadilan Pajak Sebagai Badan Peradilan Di Indonesia
Oleh Chatarina Anggia Ika Hariwati Diah Kusuma Wafdhani
- Pergeseran Tanggung Jawab Tindak Hukum Administrasi Ke Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Diskresi Hukum Pejabat Tata Usaha Negara
Oleh Marcus Lukman

VOLUME X NOMOR 2 TAHUN 2005 EDISI APRIL

Terbit 4 (empat) kali - Tiap Januari, April, Juli, Oktober

PERSPEKTIF

PUBLISH OR PERISH

DAFTAR ISI

Editorial

Artikel :

- Pengaturan Pengelolaan Konservasi Kelautan Berkelanjutan..... 75-87
Oleh Febria Nur Kasimon
- Pengaturan Hak Normatif Bagi Pekerja/Buruh Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan..... 88-103
Oleh Joko Nur Sariono dan Suhandi
- Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Etika Profesi Kedokteran Dan Hak Asasi Manusia..... 104-116
Oleh Noor Tri Hastuti dan Ratna Winahyu Lestari Dewi
- Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Guna Menciptakan Peradilan Yang Bebas Dan Tidak Memihak..... 117-137
Oleh Ronny Winarno dan Endang Retnowati
- Kejahatan Korporasi Dalam Hukum Perbankan Indonesia..... 138-150
Oleh Theodosia Yovita
- Proses Dan Lembaga Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi..... 151-163
Oleh Umi Enggarsasi
- Eksistensi Pengadilan Pajak Sebagai Badan Peradilan Di Indonesia..... 164-176
Oleh Chatarina Anggia Ika Hariwati Diah Kusuma Wardhani
- Pergeseran Tanggung Jawab Tindak Hukum Administrasi Ke Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Diskresi Hukum Pejabat Tata Usaha Negara..... 177-194
Oleh Marcus Lukman

VOLUME X NOMOR 2 TAHUN 2005 EDISI APRIL

Terbit 4 (empat) kali - Tiap Januari, April, Juli, Oktober



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

SUSUNAN DEWAN REDAKSI MAJALAH PERSPEKTIF

KETUA DEWAN REDAKSI

Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

SEKRETARIS DEWAN REDAKSI

Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum

ANGGOTA DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Indrati Rini, S.H., M.S

Ari Purwadi, S.H., M.Hum

Endang Retnowati, S.H., M.Hum

Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

Nur Yahya, S.H., M.H.

BENDAHARA

Retno Hendrati Purwaningrum, S.H., M.Hum

SIRKULASI / PEMASARAN

Ch. Anggia Ika HDKW, S.H.

MITRA BESTARI

Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S

Prof. Dr. Bambang Purnomo, S.H.

Dr. Marcus Lukman, S.H., M.H

Dr. Zudan Arief Fakrulloh, S.H., M.H.

Dr. Philip A. Kana S.H., M.H.

PENERBIT DAN PENCETAK

Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas
Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ALAMAT REDAKSI

Jl. Dukuh Kupang XXV / 54 Surabaya

Telp. (031) 5677577 Pesawat 141-142

Fax. (031) 5679791

Terbit 4(empat) kali setahun

Tiap akhir Januari, April, Juli dan Oktober

EDITORIAL

Memasuki triwulan ke-2 ditahun ini, redaksi mempertengahan hasil-hasil pemikiran yang perlu untuk dibaca dan dikritisi bagi para akademisi maupun praktisi hukum.

Tema-tema tersebut antara lain :

- *Pengaturan pengelolaan konservasi kelautan berkelanjutan.*
- *Pengaturan hak normatif bagi pekerja/buruh menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.*
- *Euthanasia dalam perspektif hukum pidana, etika profesi kedokteran dan hak asasi manusia.*
- *Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman guna menciptakan peradilan yang bebas dan tidak memihak.*
- *Kejahatan korporasi dalam hukum perbankan Indonesia.*
- *Proses dan lembaga penyidikan pada tindak pidana korupsi.*
- *Eksistensi pengadilan pajak sebagai badan peradilan di Indonesia.*
- *Pergeseran tanggung jawab tindak hukum administrasi ke tindak pidana korupsi dalam kasus diskresi hukum pejabat tata usaha negara.*

Redaksi mengucapkan terima-kasih bagi para penulis yang telah menyuguhkan pemikirannya. Kiranya gagasan dan buah pikiran yang tertulis ini dapat memberi manfa'at bagi kita semua.

Redaksi